

Penguatan Kapasitas KPM PKH dalam Memanfaatkan Family Development Session di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura

Albertina N. Lobo*, Eddy Pattanduk

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura

ABSTRACT

Alamat korespondensi:

FISIP, Kampus UNCEN-Waena,
Jl. Kamp. Wolker Waena,
Jayapura Papua. 99358. Email:
albertinanasril21@gmail.com

Dependence on conditional cash social assistance programs from the government is a classic problem and needs to be avoided by increasing the capacity of beneficiary families. The activity of strengthening the capacity of PKH KPM in utilizing family development sessions aims to improve understanding, knowledge, and skills about financial management and family independent businesses, in Sereh village, Sentani district, Jayapura regency. The implementation method includes brainstorming, counseling, group discussions, documentation and evaluation. The results of the implementation of the activity explain that family capacity focuses on finances and work motivation. Sustainable family financial and business management has minimal information and training, after counseling, families prioritize needs, namely the needs of school children, business capital, family social costs, and savings. However, aspects of family commitment and openness to business management are factors that influence family capacity. Collaboration between academics, PKH assistance, and PKH independent families is needed so that beneficiary families are confident in the commitment of the business being developed so that they avoid the acute poverty zone.

Manuskrip:

Diterima: 29 Februari 2025

Disetujui: 28 April 2025

Keywords: Capacity; Family Development Session; Distrik Sentani

PENDAHULUAN

Pencapaian kehidupan yang lebih baik, terhindar dari kemiskinan ekstrim, serta pemerataan keadilan untuk kesejahteraan merupakan tujuan semua orang dan cita-cita pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2016; UU Kesos Nomor 11 Tahun 2009). Namun pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah, tantangan global yang dihadapi seperti, kemiskinan, akses layanan kesejahteraan sosial yang rendah, permasalahan kesehatan, ekonomi, pendidikan, keamanan, bencana alam, kerusakan lingkungan, keadaan geografis, kelaparan, kondisi moneter, ketidaksetaraan gender, dan lain sebagainya, adalah isu yang masih terus membutuhkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang berdampak secara global, guna memastikan adanya masa depan yang lebih baik (sdgs.bappenas.go.id).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial langsung tunai (*conditional cash transfer*), dipandang penting dan strategis (ADB, 2010; World Bank, 2013; Suharto, 2013; Iriyanti, 2014; Octalia, 2018; Lobo, 2019). Dalam instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2022 menegaskan pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0% di tahun 2024, dilakukan dengan tiga persyaratan utama, seperti: penguatan kualitas program, pemuktahiran data terpadu, dan konversi program daerah (kemenkopmk.go.id, 2023). Dengan adanya perhatian pemerintah terhadap isu kemiskinan ekstrim, menandakan bahwa kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat masih sangat masif, walaupun data kemiskinan di tahun 2022-2023 mencapai 0,2%.

Keberadaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan, seperti program keluarga harapan (PKH) sejak tahun 2007 hingga

sekarang, dipandang berhasil menurunkan angka kemiskinan, mengurangi resiko dan siklus kemiskinan pada kelompok rentan, antar generasi, bahkan resiko akibat covid-19, di berbagai daerah (Dirjamsoskel, 2017; Pedoman PKH, 2021). Tetapi capaian keberhasilan ini, belum menjamin terbebasnya individu, keluarga dan komunitas dari kemiskinan ekstrim, mengingat kompleksnya faktor yang mempengaruhi seperti, rantai kemiskinan yang mengakar, desain program promotif dan pengembangan yang kurang inklusif dan berkelanjutan, kesetaraan-relasi gender yang tidak significant dalam keluarga, serta tantangan perubahan pola perilaku keluarga penerima manfaat (TNP2K, 2016; Hanif, 2015; Mawardi, 2013; Nainggolan, 2019; Lobo, 2018) . Selain itu persoalan kemampuan SDM PKH, mekanisme program, kapasitas kemampuan dan pola perilaku masyarakat masih rendah, pemanfaatan FDS belum maksimal, rendahnya motivasi graduasi secara mandiri KPM, pengetahuan inklusif keuangan KPM masih membutuhkan pendampingan serius (Ditjenlindansos RI, 2023).

Family Development Session Program PKH merupakan wadah intervensi bersama antar KPM PKH dan pendamping PKH. Family Development Session atau dikenal dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) PKH dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan tujuan:

1. meningkatkan pengetahuan KPM PKH,
2. meningkatkan kemampuan praktis KPM PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga,
3. meningkatkan kesadaran pada ibu Hamil dan melahirkan tentang pentingnya gizi dan kesehatan seribu hari perama kelahiran,
4. meningkatkan kemampuan mengenal permasalahan dan kebutuhan anak, mencegah kekerasan pada anak, serta strategi pemenuhan hak-hak dasar anak,
5. meningkatkan kepedulian KPM PKH kepada

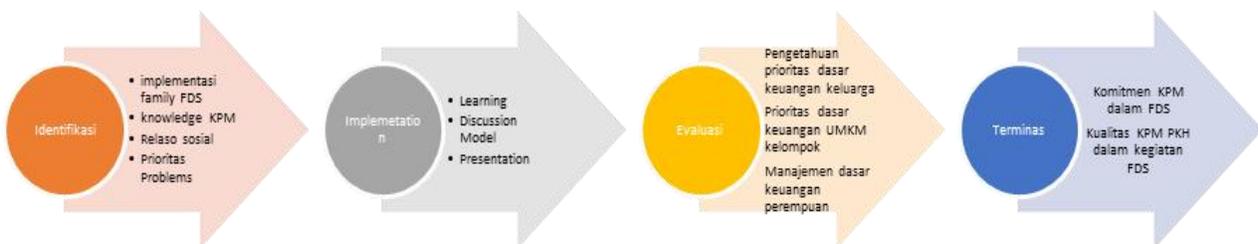
kelompok rentan seperti lanjut usia dan disabilitas yang ada dalam keluarga,

6. meningkatkan kepekaan dan kesadaran KPM PKH tentang pentingnya akses layanan publik yang disediakan pemerintah (Dirjamsos, 2017).

Objektifnya suatu tujuan program sosial sangat ditentukan oleh pendekatan program, politik, budaya dan kepekaan manusia (sasaran program) terhadap program (Chamber, 2000; Gogging, 1990; Grindle, 2010; Devereux & Sabates-Wheeler, 2004; Jones, 1996).

KPM PKH kabupaten Jayapura secara kuantitas meningkat setiap tahun, sejak tahun 2016, dengan dinamika pelaksanaan yang beragam. Setiap KPM PKH diharapkan memanfaatkan P2K2, namun tidak semua KPM memahami dan aktif berpartisipasi. Orientasi terhadap nilai bantuan (uang tunai) lebih menarik, KPM belum mengenal potensi dan sumber kesejahteraan sosial di sekitar lingkungan, rendahnya motivasi mencapai sertifikasi graduasi KPM, tingkat kesulitan KPM yang beragam.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengembangan kapasitas KPM PKH dalam memanfaatkan wadah *Family Development Session* diyakini perlu dilakukan di Kabupaten Jayapura, karena dengan penguatan kapasitas, KPM PKH semakin memiliki daya kekuatan dalam pemenuhan tujuan PKH, berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. Tujuan pengabdian ini meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan tentang pengelolaan keuangan dan usaha mandiri keluarga, di Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kbuupaten Jayapura. Hasil pengabdian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya profesionalisme pendamping PKH sehingga mendapatkan KPM yang berdaya secara mandiri.



Gambar 1. Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi, yang bertujuan membantu masyarakat untuk mencapai keterpenuhan kebutuhan dan solusi penyenangan permasalahan diberbagai aspek. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat Metode pelaksanaan pengabdian ini, dimulai dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan tahapan terminasi. Setiap tahapan memiliki sub-sub kegiatan yang didasarkan pada topik dan tujuan pengabdian. Adapun metode pelaksanaan pengabdian mencakup (Gambar 1).

Tahapan demi tahapan kegiatan yang dilaksanakan bersama keluarga penerima manfaat PKH di Kampung Sereh Distrik Sentani, bertujuan untuk mentransferkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, guna meningkatkan daya untuk memanfaatkan kegiatan family development session dengan baik dan berkelanjutan. Dengan demikian kegiatan evaluasi pun dilaksanakan, adapun evaluasi meliputi aktifitas sebelum dan sesudah kegiatan, Adanya respon baik dari keluarga penerima manfaat, dan pendamping PKH merupakan indikator keberhasilan sebelum dilaksanakannya kegiatan, sedangkan adanya kemampuan menyusun prioritas keuangan keluarga dan usaha, serta kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dalam keluarga, merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dan adanya wujud dari sebuah laporan pengabdian yang tersusun secara ilmiah dan terpublikasi dalam jurnal ilmiah, merupakan indikator keberhasilan sebuah laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan kapasitas keluarga penerima manfaat (KPM) dalam memanfaatkan Family Developments Session, merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan dalam waktu sehari (1 hari), di tanggal 10 Juni 2024 dan di mulai jam 10.00–17.00 Wit. Sedangkan lokasi pelaksanaan adalah

Kampung Sereh, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua.

Secara administrasi kampung Sereh merupakan salah satu dari tujuh (7) kampung yang ada di distrik Sentani. Kampung-kampung tersebut adalah kampung Hobong, Ifar Besar, Ilfalem, Keheran, Sereh, Yahim, Yobeh. Selain itu distrik Sentani memiliki tiga (3) kelurahan, yaitu Dobonsolo, Hinekombe, dan Sentani Kota.

Penguatan kapasitas KPM PKH dalam memanfaatkan *family development session*, menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Dibagian pembukaan kegiatan pengabdian melakukan sesi penyampaian materi dan sharing pengalaman KPM PKH terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha keluarga. Setiap KPM PKH memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pengalaman dalam mengelolah keuangan keluarga, dan usaha keluarga. Berdasarkan penyampaian materi, diskusi, serta curah pendapat/metode brainstorming ini, didapatkan informasi KPM, sebagai berikut:

1. Pendapatan Keluarga, meliputi:

Penjualan hasil kebun, jualan pinang, jualan minuman saset jasjus, pekerjaan suami, usaha kupon dan bantuan sosial lainnya. Rata-rata pendapatan KPM PKH adalah 200-300/bulan. Pendapatan yang diperoleh tergantung pada modal yang dimiliki KPM PKH. Umumnya pendapatan akan bertambah atau berkurang apabila bahan buku penjualan habis terjual atau terbeli oleh pembeli, dan sebaliknya akan berkurang. Semangat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, KPM PKH tetap melakukan kegiatan yang mendatangkan sumber pendapatan. Mayoritas sumber pendapatan KPM PKH adalah subsistem.

2. Pengeluaran Keluarga, meliputi:

Biaya sekolah anak, biaya kebutuhan pokok keluarga, biaya listrik dan internet, biaya modal usaha, biaya sosial lainnya. KPM PKH mengakui bahwa kebutuhan pengeluaran keluarga lebih tinggi dari pada sumber pendapatan. Hal ini dikarenakan realita kehidupan yang dialami. Biaya kehidupan sangat mahal dan sumber pendapatan semakin kecil, biaya tak terduga meningkat dan kehidupan tetap berlangsung. Menurut KPM PKH rata-rata pengeluaran mencapai 300an. Jika membandingkan dengan pendapatan tentunya pengeluaran tinggi,

biaya transportasi dan biaya sosial lainnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi.

3. Pengetahuan Penyeimbangan Keuangan Keluarga

KPM PKH sepakat bahwa kesulitan dalam menyeimbangkan keuangan keluarga, umumnya menjelaskan bahwa bagaimana menyeimbangkan keuangan, jika sumber keuangan saja tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tentunya pendapat ini menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan keluarga dan usaha. Terkadang hasil jualan tidak mencukup, namun komitmen dan kejujuran menjadi poin dalam pengelolaan keuangan dan usaha.

Teridentifikasi sumber pendapatan, pengeluaran dan pengetahuan terkait penyeimbangan keuangan keluarga dari KPM PKH, tim pengabdian kemudian melakukan kegiatan penguatan kapasitas KPM PKH dalam memanfaatkan FDS, melalui menyusun prioritas, anggaran dan komitmen menjalankan keuangan keluarga. Tim pengabdian kemudian membentuk tiga kelompok, dan masing masing kelompok menyusun prioritas, anggaran dan komitmen dalam mengelola keuangan keluarga maupun kelompok usaha (Gambar 2).

Berdasarkan hasil diskusi kelompok KPM PKH dalam memanfaatkan *family development session*, dengan materi pengelolaan keuangan dan usaha keluarga, dihasilkan suatu kesepakatan kelompok, terhadap 3 (tiga) item, yaitu kebutuhan prioritas, jumlah anggaran, dan komitmen dalam menyeimbangkan keuangan keluarga dan usaha (Tabel 1).

Penguatan kapasitas KPM PKH dalam memanfaatkan *family developments session*,

khususnya pada penguatan pengelolaan keuangan dan usaha keluarga, merupakan hal yang menarik dan dibutuhkan KPM PKH. Setiap KPM menjadi mengetahui tentang pengaturan keuangan dengan komitmen dan kejujuran yang tinggi. KPM PKH juga menjadi terlatih untuk bagaimana mengatur keuangan usaha kelompok secara transparan yang didasari komitmen dan kejujuran. KPM juga mengusulkan agar setiap kegiatan ekonomi dapat diberikan dukungan modal, sehingga peningkatan ekonomi keluarga dan wawasan dalam pengelolaan keuangan menjadi seimbang, terjaga dan berkelanjutan. Kegiatan lainnya, seperti pengasuhan dan perlindungan anak, sangat menarik dilakukan, diwaktu waktu mendatang. KPM PKH juga termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan FDS atau kegiatan peningkatan dan penguatan keluarga peserta PKH (P2KP) baik di tingkat kelurahan dan kampung.

Kegiatan FDS yang menarik dan bermanfaat bagi keluarga penerima PKH, di kampung Sereh, masih tergantung pada desain dan kontribusi program secara nasional. Walaupun demikian KPM PKH di kampung Sereh memiliki motivasi yang tinggi untuk terlibat secara langsung apabila kegiatan peningkatan kemampuan KPM, karena menyakini bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan sangatlah dibutuhkan seiring dengan peningkatan teknologi dan kebutuhan dasar keluarga, serta tantangan-tantangan global yang semakin menuntut setiap keluarga memiliki podasi yang kuat dalam keluarga. Kebiasaan memanfaatkan waktu untuk kegiatan ekonomi subsistem selama ini beralasan karena pengetahuan terkait FDS masih minim. Kreatifitas pendamping PKH

Tabel 1. Kebutuhan prioritas KPM dalam kegiatan FDS.

No	Kebutuhan prioritas keluarga	Anggaran	Komitmen
1.	Pengasuhan anak, pendidikan anak, kesehatan, kebutuhan sandang, transportasi, wifi, listrik,	1.500.000	Prioritas pendidikan anak, transportasi, listrik
2.	Modal usaha pinang dan hasil kebun, minuman saset jas jus	1.000.000	Tidak menggabungkan hasil jualan dengan pendapatan dari pekerjaan suami; Menyisihkan modal usaha setiap hari
3.	Biaya sosial keluarga	500.000	Mengutamakan yang sangat membutuhkan
4	Tabungan	50.000	Dua bulan sekali menabung

(Sumber: Data hasil pengabdian, 2024).

menjadi ujung tombak dalam melaksanakan kegiatan FDS dengan tepat, namun dukungan dan penghargaan, pengakuan terhadap kinerja pendamping PKH sangatlah dibutuhkan, sehingga terwujudnya capaian kemandirian KPM PKH.

Media penguatan kapasitas keluarga dalam mengendalikan kemiskinan, dapat dilakukan dengan keluarga maupun kelompok, (Suharto, 2006). Penguatan kapasitas keluarga melalui pemanfaatan family development session (FDS) merupakan wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan keluarga serta perlindungan sosial, namun masih sangat minim pelaksanaan. Siklus pelaksanaan yang didasari pada waktu pendistribusian dan monitoring menjadi salah satu faktor minimnya pelaksanaan, disamping pilihan keluarga penerima manfaat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar hidup, serta perhatian yang berkala terhadap usaha ekonomi yang kurang maksimal. Tentunya bahwa kemampuan individu dalam keluarga sebagai sentral perlu menunjukkan fungsinya secara inklusif dan berkelanjutan, mengingat perhatian yang serius dan berkala mampu mengkondisikan situasi secara efektif (Homan, 2008). Pembangunan melalui penguatan kapasitas keluarga sebagai modal sosial ekonomi untuk mewujudkan resposivitas terhadap gejala kemiskinan dan ketergantungan bantuan sosial, akan menguraikan hasil yang efektif jika jejaring sosial berbasis kearifan lokal diikutsertakan mengendalikan kemiskinan dan kemandirian keluarga serta kesetaraan gender.

Hal ini sejalan dengan tiga elemen pemberdayaan yaitu, pengembangan, penguatan kapasitas, dan pencapaian kemandirian (Anwas,

2014). Keikutsertaan keluarga terutama kaum perempuan akan semakin memosisikan mereka dalam ruang dan aktifitas sosial, yang lambat laun dapat beradaptasi dengan aspek kemandirian keluarga sehingga tidak rentan miskin (Hasrul dkk., 2015). Dengan demikian penguatan kapasitas keluarga dalam memanfaatkan family development session dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dimaksudkan menjadikan keluarga penerima manfaat lebih responsive dan mandiri. Penilaian terhadap penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat melalui aktivitas penguatan keuangan keluarga yang berfokus pada jenis usaha keluarga yang dilakoni kaum perempuan, diketahui bahwa pengetahuan manajemen keuangan keluarga sangat tergantung kepada kaum ibu/perempuan yang sebelumnya sangat sederhana mengelolah hasil pendapatannya, dengan kegiatan ini terdapat peningkatan, merangkap sangat baik, jujur menyampaikan harga jualan, keuntungan, dan hambatan yang dialami, sehingga mudah diketahui posisi kelemahan dalam mengatur keuangan, merangkap secara terlatih dan serius mampu mengidentifikasi prioritas jenis produk dan harga yang dijual dalam kelompok dan keluarga, adanya komitmen keuangan terhadap usaha mandiri perempuan, seperti pembuatan roti tawar/manis, minuman jaszus, pinang, sagu bakar, dan ikan mujair; memanfaatkan handphone dan jaringan media sosial untuk menambah wawasan terkait harga hasil kebun dan produk olahan rumah (*homemade*) yang nampak dari adanya kebutuhan pembelian pulsa telepon dalam sebulan; merasakan adanya pengetahuan tentang prioritas kebutuhan



Kelompok 1



Kelompok 2



Kelompok 3

Gambar 2. Suasana diskusi kelompok dalam menyusun prioritas, anggaran dan komitmen.

keluarga, sosial, ekonomi, budaya. Hal yang menarik bahwa komitmen kaum perempuan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, dalam kegiatan kelompok kerja masih membutuhkan pendampingan berkelanjutan, sehingga kepercayaan diri dan atmosfer kelompok kerja tetap solid.

KESIMPULAN

Penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat PKH dalam memanfaatkan family development session di kampung Sereh distrik Sentani kabupaten Jayapura, merupakan sarana penguatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan keluarga penerima manfaat dalam mencapai kemandirian keluarga. Penguatan kapasitas melalui pengelolaan keuangan dan usaha mandiri keluarga, mengajak keluarga agar lebih objektif mengelolah keuangan mengidentifikasi kebutuhan prioritas dan komitmen, sehingga memiliki daya saing yang berkelanjutan. Keluarga penerima manfaat sebagai peserta penguatan kapasitas keluarga menyadari bahwa komitmen terhadap kapasitas keuangan keluarga dan kelompok kerja sangat penting. Mengidentifikasi, merencanakan, mengelolah, dan merefleksikan pendapatan dan pengeluaran dalam keluarga, dinyakini sebagai cara mencegah keluarga terjaring kemiskinan akut. Adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, terutama pada jenis usaha, dimana kaum perempuan sebagai peserta kegiatan, mengetahui bahwa keberagaman jenis jualan yang konsisten, dapat menambahkan pendapatan dan motivasi kerja, serta pengaturan keuangan menjadi tepat. Komitmen dalam kelompok kerja PKH membantu meningkatkan pengetahuan, jejaring sosial, dan kerjasama, untuk mengendalikan masalah ekonomi, sosial, kemiskinan akut dalam KPM PKH. Penguatan kapasitas terutama pada aspek empowering, masih dibutuhkan keluarga penerima manfaat program, terutama pada pengembangan kapasitas melalui *family development session*. Dukungan sumber daya manusia

sebagai pendamping PKH menjadi sentral keberhasilan dalam penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat. Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, disarankan kepada keluarga penerima manfaat untuk tetap memanfaatkan family development session untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, agar memiliki kemandirian dan keluar dari zona kemiskinan. Mempertimbangkan koborasi pendamping PKH dan para akademisi dalam mengelolah aktifitas family development session yang bernuansa kearifan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih yang telah memberi kesempatan dan dukungan finansial guna penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dosen melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kepada pendamping PKH dan keluarga penerima manfaat PKH di kampung Sereh distrik Sentani yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, tim pengabdian yang terlibat langsung menyusun dan menyampaikan materi. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan berlanjut sehingga memiliki manfaat bersama untuk pengendalian kemiskinan berbasis keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank. 2005. Social Protection Strategy, Manila" ADB in Indonesia (Manila).
- Anwas, E.O.M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Bandung Alfabeta.
- Armando, Barrientos. 2010. Social Protection and Poverty. Social Policy and Development Programme Paper Number N0 42. E-Paper. United Nations Research Institute for Social Development.

- Chambers, D.E. 2000. *Social Policy and Social Program A Methods for the Practical Public Policy Analyst Third Edition*. Allyn and Bacon. London.
- Devereux, S. and Sabates-Wheeler, R. 2004. *Transformative Social Protection*. IDS Working Paper 232, Brighton.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. 2017. *Pedoman Umum Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. 2023. *PKH Membanggakan dan Memunculkan Tantangan*. Jakarta.
- Gogging, M.L. 1990. *Implementasi Teori And Practice: Toward Athrid Generation*. Illinois: Scoot, Foresman/Little Brown Higher Education.
- Grindle. M.S. 1980. *Politic and Policy Implementation in The Thrird Word* (M. Grindle, Ed) New Jersey: Proncenton university Press.
- Hanif H., D. Fatimah, A. Zubaedah, Juhriati, K. Suvianita, W. Adhi, Z. Maci. 2015. *Analisa gender terhadap implementasi PKH di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timut) dan Kabupaten Bima*, Jakarta, Komunitas Pejaten.
- Iriyanti. R. 2014. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah Kedepan*. Jakarta: Bappenas.
- Kementerian Sosial RI. 2021. *Pedoman Umum Keluarga Harapan*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. 2023. *Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 turun 1.12%*, <https://www.kemenkopmk.go.id>.
- Lobo, A.N. 2019. *Analisis PKH berbasis Pendekatan Kepekaan Budaya di Kota Jayapura*. Bandung : UNPAD.
- Lobo, A.N. 2018. *Empowering Poor Families Trough Conditional Cash Transfer in Papua*. Bandung: Unisba. (Social and Humaniora Research Symposim (Sores 2018). pp: 401-403.
- Mawardi, S. 2013. *Program Pemerintah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*. NEWSLetter SMERU N0.34/2013. Hal.: 18-22. <https://www.smeru.or.id>.
- Nainggolan, T. 2017. *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan: Studi di Empat Daerah di Indonesia*. Jakarta: Publistbang Kesos Kementerian Sosial RI.
- Nainggolan, T. 2019. *Aspek Gender dalam Program Keluarga Harapan*. *Jurnal Sosio Informa*, 5(1), 22-26.
- Octaloia, H., dan D. Vijayanti. 2018. *Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin Peserta Program Keluarga harapan di Kabupaten Buton Selatan*. Bandung. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(1), 94-119.
- Peraturan Presiden No. 4 tahun 2024 tentang kemiskinan ekstrim.
- Soeharto, E. 2011. *Social Protection Systems in Asean: Social Policy in a comparative analysis dalam Social Development Issues*, 31, 1-21.
- Soeharto, E. 2018. *Memperkuat Negara Kesejahteraan Pemimpin Pro Kesejahteraan Sosial*. Seminar Bincang Seru Main Event Prime Project 1.01. STKS Bandung.
- TNP2K. 2016. *Data Kemiskinan 2016*, <http://www.tnp2k.go.id>.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- United Nations. 2016. *Economic and Social Council: Report of The Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indication*, Page :15.